

Analytica Islamica



Vol. 8, No. 2, Nopember 2006

**NURCHOLISH MADJID AND THE IDEA OF
RELIGIOUS PLURALISM AND TOLERANCE**

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

**EARLY ISTIHSAN AND ITS RATIONALIZATION
IN THE POST FORMATIVE PERIOD**

Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara

Analytica Islamica

Vol. 8, No. 1, Mei 2006

Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU
Ketua Penyunting : Syukur Kholil

Penyunting Pelaksana : Nawir Yuslem
Hasan Asari
Lahmuddin Nasution
Abd. Mukti
Faisar Ananda

Penyunting Ahli : M. Yasir Nasution
Haider Daulay
Nur A. Fadhil Lubis
Syahrin Harahap
Hasyimsyah Nasution
Ramli Abd. Wahid
Amiur Nuruddin
Usman Pelly
M. Solly Lubis
Prayitno
Bahren Umar Siregar
Suwardi Lubis
Sofyan Safri Harahap
Saiful Azhar Rosli

Sekretaris : Katimin
Pembantu Umum : Irwan
Asnil Aidah Ritonga
Muammar Nasution

Distributor : Syufri Basrah

Diterbitkan Oleh : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,
Helvetia Timur Medan 20124
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8474458
E-mail: ppsiaain@indosat.net.id

Akreditasi: Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Nomor:
26/DIKTI/Kep/2005, Tanggal 30 Mei 2005

**Diterbitkan setiap enam bulan sekali
sejak Tahun 1999**

PENGANTAR

Dalam edisi ini dibahas berbagai aspek kajian Islam, meliputi sumber ajaran Islam (Alqur'an), pendidikan Islam, hukum Islam, pemikiran Islam dan komunikasi Islam. Dalam kajian Alqur'an misalnya, Abd. Mukti menulis tentang wawasan Alqur'an mengenai musyawarah. Menurutnya, Alqur'an telah menganjurkan umat Islam untuk musyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab melalui musyawarah setiap masalah dapat dipecahkan.

Dalam bidang pendidikan Islam ada dua tulisan, yaitu tulisan dari Dja'far Siddik tentang kedudukan guru sebagai pendidik dalam sistem pendidikan Muhammadiyah, dan tulisan Syaiful Akhyar Lubis tentang pemberdayaan dosen IAIN menuju profesionalisme.

Sedangkan dalam bidang hukum Islam antara lain Akhmad Syukri Saleh membahas tentang perkembangan teori hukum Islam pada awal Islam dan era pasca-formatif, Pagar menulis tentang persoalan dualisme hukum pidana di Nanggroe Aceh Darussalam dari sudut dampak penerapan syari'at Islam-nya.

Dalam edisi ini juga dimuat kajian dari Zainul Fuad mengenai ide-ide Nurcholis Madjid tentang pluralisme dan toleransi beragama. Menurutnya, Nurcholis Madjid memandang Islam sebagai sikap mental yang tidak hanya terbatas bagi orang Islam, tetapi juga bisa muncul pada penganut agama lain yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, masih ada tulisan lain yang amat menarik dan penting untuk dibaca.

Selamat membaca !

Penyunting

DAFTAR ISI

Wawasan Alqur'an Tentang Musyawarah Abd. Mukti	1
Kedudukan Guru Sebagai Pendidik Dalam Sistem Pendidikan Muhammadiyah Dja'far Siddik	19
Pemberdayaan Dosen Iain Menuju Profesionalisme Saiful Akhyar Lubis	44
Early <i>Istihsan</i> and Its Rationalization in The Post Formative Period Ahmad Syukri Saleh	61
Persoalan Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam: Analisis Terhadap Dampak Penerapan Syari'at Islam Pagar	75
Some Notes on The Origins of The Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) Abd. Mukhsin	106
A Brief Note on 'Abd Al-Razzaq Al-Sanhuri: The Master Architec of Civil Codes of Arab Countries Mhd. Syahnhan	117
Konsep Harta Dalam Islam: Perspektif Filsafat Hukum Islam Ibrahim Siregar	131

Nurcholish Madjid and The Idea of Religious Pluralism and
Tolerance

Zainul Fuad..... 146

Hubungan Komunikasi Antarpersonil Pimpinan-Bawahan
dengan Kepuasan Kerja dan Kesetiaan kepada Lembaga
IAIN Sumatera Utara Medan

Syukur Kholil..... 161

Strategi Penanggulangan Dampak Lingkungan Menuju
Pemantapan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
di Sumatera Utara (Suatu Kajian dari Sudut Kualitas Hidup
Penduduk dalam Perspektif Otonomi Daerah)

Indra Jaya..... 181

DUALISME HUKUM PIDANA DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: Analisis Terhadap Dampak Penerapan Syari'at Islam

Pagar

Abstrak

Meskipun kekhawatiran adanya dualisme hukum pidana di Nangroe Aceh Darussalam dalam persepsi berbagai pihak sebagai hal yang mengancam asas keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mengancam idealisme penerapan syari'at Islam lewat qanun-qanun dalam Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, ternyata secara teoritis dan praktis hal itu tidak terbukti sama sekali. Secara teoritis, dalam hal mereka telah diberi keleluasaan menentukan nasib sendiri untuk menerapkan hukum pidana Islam, maka penerapan itu tidak menjadi persoalan, bangsa Indonesia, dan semua pihak harus mendukungnya, karena itu adalah hak yang telah disepakati menjadi milik mereka. Secara praktis, sampai saat ini persoalan dualisme hukum belum pernah menjadi masalah, dan diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena masing-masing pihak berjalan pada fungsi dan perannya masing-masing.

Kata kunci : Hukum pidana Islam dan Otonomi yang seluas-luasnya, Hukum Pidana, NKRI, dan wawasan kebangsaan.

Pendahuluan

Sejak awal pembentukan Negara Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah sepakat memancang dasar dan falsafah negara adalah Pancasila dan UUD 1945, di mana sila pertama Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, dan salah satu pasal dari UUD 1945 itu menjamin kemerdekaan seluruh penganut agama untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Indonesia dalam bentuk ini dinyatakan sebagai negara dalam dimensi duniawi, namun tetap memberikan tempat bagi setiap warganya untuk melaksanakan ajaran agama.¹ Dengan demikian pluralitas warga dari berbagai aspeknya harus tunduk dan patuh terhadap hukum Nasional yang berlaku secara

universal bagi seluruh komponen bangsa di mana pun mereka berada tanpa kecuali.

Secara historis terlihat adanya upaya simultan kelompok Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia untuk berkeinginan mewarnai dasar negara dengan nuansa keislaman. Hal ini telah dimulai sejak awal kemerdekaan diperoleh dan berkesinambungan sampai era reformasi sekarang ini, misalnya; a). Perbincangan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berakhir dengan kesepakatan penghapusan tujuh kata “... *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya*”, dan penghapusan ini diganti dengan klausa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai prinsip monotheisme yang sama-sama dimiliki seluruh penganut agama.² Dengan hal ini, kelompok Islam juga turut merasa memiliki di dalamnya., b). Perdebatan sengit Majelis Konsituante (1956-1959). Partai-partai Islam yang dimotori oleh Masyumi, NU, dan PSII berupaya menghidupkan kembali ide islamisme ini, tetapi karena kelompok ini tidak cukup kuat dibanding dengan kelompok Nasionalis, mereka hanya memperoleh 43 persen suara (114 kursi dari 257 kursi yang ada) lalu ide ini pun kandas juga.,³ c) Terakhir, ide menghidupkan kembali Piagam Jakarta lewat amandemen ke IV pasal 29 UUD 1945 tentang agama yang muncul di era reformasi ini oleh beberapa partai, juga tetap gagal.⁴ Dengan demikian, sampai saat ini bangsa Indonesia tetap konsisten dengan dasar negara yang netral agama tersebut.

Nuansa baru dinamika bangsa saat ini ditandai dengan menguatnya posisi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, istimewa sekali Nangroe Aceh Darussalam (NAD) karena telah diberi kesempatan untuk menerapkan syari’at Islam. Era reformasi ternyata telah secara sertamerta menggebrak pintu Otonomi Daerah di seluruh Indonesia, bahkan otonomi yang seluas-luasnya bagi NAD untuk dapat melaksanakan sayari’at Islam, hal ini sejalan dengan maksud kelahiran UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), Kemudian lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134). Terakhir, lebih dioperasionalkan lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syari’ah dan Mahkamah Syari’ah Propinsi di

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.⁵ Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di NAD yang berbeda dengan hukum pidana Indonesia secara umum.

Letak Geografis Nangroe Aceh Darussalam

Nangroe Aceh Darussalam (NAD) adalah salah satu propinsi dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. Ibu kotanya Banda Aceh (dahulu dikenal dengan nama Kuta Raja). Secara territorial daerah ini terletak pada posisi sebelah Barat paling ujung Indonesia, berada persis di ujung pulau Sumatera yang secara langsung berbatasan dengan dunia luar pada Selat Malaka di bagian Utara dan Timur, dan Samudra Indonesia di bagian Barat, selanjutnya sebelah selatan secara langsung berbatasan dengan daerah Sumatera Utara, karenanya, pinggir (perbatasan) daerah ini lebih banyak dikelilingi lautan dari pada daratan.⁶

Sampai pada bulan Juli 2005, posisi geografis daerah ini dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut:

1.	N ama Daerah	Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
2.	Status	Otonomi Khusus
3.	Letak	02-06 derajat Lintang Utara 95-98 derajat Lintang Selatan
4.	Luas Daerah	5.736.557 Km
5.	Tinggi Rata-rata	125 m di atas permukaan laut
6.	Batas daerah : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat	Berbatas dengan : Selat Malaka Propinsi Sumatera Utara Selat Malaka Samudera Indonesia
7.	Daerah melingkupi	119 Pulau 35 Gunung 73 Sungai Penting
8.	Banyaknya Daerah Tingkat II	17 Kabupaten 04 Kota
9.	Banyaknya Kecamatan	228
10.	Banyaknya Mukim	642
11.	Banyaknya Kelurahan	112
12.	Banyaknya Desa	5.947

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Kantor Gubernur Nangroe Aceh Darussalam

Lahan yang tersedia di NAD berjumlah 5.736.557,00 ha. Dengan penggunaan sebagai berikut;

Luas Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Menurut Penggunaan Lahan, Tahun 2003

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Perkampungan	112.657,43	1,96
2.	Industri	3.868,92	0,07
3.	Pertambangan	443,00	0,01
4.	Persawahan	314.140,68	5,48
5.	Pertanian tanah kering	117.161,12	2,04
6.	Kebun	294.934,01	5,14
7.	Perkebunan :		
	- Perkebunan besar	205.550,75	3,58
	- Perkebunan Kecil	367.501,78	6,41
8.	Padang rumput, alang-alang, semak	223.985,00	3,91
9.	Hutan (lebat, belukar, sejenis)	3.929.420,05	68,50
10.	Perairan Darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau, rawa)	132.168,41	2,30
11.	Tanah Terbuka(tandus, rusak, land clearing)	18.574,35	0,32
12.	Lain-lain	16.151,50	0,28
	Jumlah	5.736.557,00	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Nangroe Aceh Darussalam tahun 2004

Daerah ini juga merupakan pusat gempa bumi yang senantiasa menggetarkan NAD, di antaranya gempa bumi dan tsunami dahsyat yang telah menyentak dunia karena telah merenggut ratusan ribu jiwa manusia, yang terjadi 26 Desember 2004. Karenanya NAD merupakan daerah yang rawan gempa, dengan penampakan sbb.

Banyaknya Gempa Bumi Setiap Bulan Tahun 2003

No.	Bulan	Jumlah	Gempa	Tercatat Jumlah
		Pusat di Prop. NAD	Pusat di luar Prop. NAD	
1.	Januari	164	7	171
2.	Pebruari	126	1	127
3.	Maret	102	15	117
4.	April	136	3	139
5.	Mei	100	21	121
6.	Juni	140	5	145
7.	Juli	121	12	133
8.	Agustus	117	7	124
9.	September	111	111	122
10.	Oktober	116	20	136
11.	Nopember	119	13	132
12.	Desember	115	24	139
JUMLAH		1.467	139	1.606

Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banda Aceh tahun 2004

Dapat ditambahkan bahwa sejak tanggal 26 Desember 2004 (pasca gempa dan tsunami dahsyat yang terjadi di NAD) sampai sekarang tanggal 8 Maret 2006 (selama 14 bulan) ternyata kuantitas gempa itu meningkat tajam lagi, yaitu tercatat telah terjadi gempa sebanyak 10.709 kali.⁷ Secara kuantitas hal ini meningkat kira-kira 6 kali lipat jumlah gempa yang terjadi pada tahun 2003 seperti terlihat pada penjelasan di atas. Peningkatan ini dimungkinkan sebagai rentetan dari gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 tersebut.

Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Sensus Penduduk Aceh & Nias (SPAN) pasca gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial (BPS) bekerjasama dengan Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan BAPPENAS, serta Lembaga Donor Internasional UNFPA pada tanggal 26 Desember 2005 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk NAD secara keseluruhan setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami tersebut adalah 4.031.589 orang, dengan klasifikasi 3.970.853 orang yang memiliki tempat tinggal atau tersedia tempat tinggalnya, dan 60.736 orang yang

tidak tersedia tempat tinggalnya.⁸ Inilah data terakhir tentang jumlah penduduk NAD yang dapat dipedomani sampai saat ini.

Dari jumlah penduduk seperti dikemukakan di atas, secara keseluruhan tersebar pada 21 Kabupaten/ Kota yang ada di NAD sebagai berikut;

Sebaran Penduduk Berdasarkan Kabupaten/ Kota Dan Jenis Kelamin

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Wanita	Jlh	Persentase
1.	Simeulue	40.519	37.870	78.389	1,9
2.	Aceh Singkil	75.177	73.100	148.277	03,7
3.	Aceh Selatan	93.684	97.855	191.539	04,8
4.	Aceh Tenggara	4.143	84.910	169.053	04,2
5.	Aceh Timur	150.785	53.858	304.643	07,6
6.	Aceh Tengah	81.016	79.533	160.549	04,0
7.	Aceh Barat	76.932	73.518	150.450	03,7
8.	Aceh Besar	152.377	144.164	296.541	07,4
9.	Pidie	228.404	245.955	474.359	11,8
10.	Bireuen	169.767	182.068	351.835	08,7
11.	Aceh Utara	241.942	251.728	493.670	12,2
12.	Aceh Barat Daya	58.809	58.867	117.676	02,9
13.	Gayo Lues	35.488	36.557	72.045	01,8
14.	Aceh Tamiang	118.581	116.733	235.314	05,8
15.	Nagan raya	61.609	62.134	123.743	03,1
16.	Aceh Jaya	31.495	29.145	60.640	01,5
17.	Bener Meriah	53.166	52.980	106.146	02,6
18.	Banda Aceh	93.074	83.829	176.903	04,4
19.	Sabang	14.663	13.934	28.597	00,7
20.	Langsa	68.518	69.068	137.586	03,4
21.	Lhokseumawe	75.614	78.020	153.634	03,8

Sumber: Hasil sensus penduduk pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias) oleh Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005.

Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di NAD cukup kondusif. Secara umum konsep trilogi kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Perseteruan masyarakat atas dasar perbedaan agama hampir tidak pernah terjadi,

demikian juga dengan persetujuan atas dasar internal umat beragama tersebut, hanya saja persetujuan masyarakat beragama, terutama Islam dengan pemerintah sedikit mengalami kendala, dalam hal ini dicontohkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu adanya segelintir masyarakat yang mengatasnamakan demi terselenggaranya penegakan syari'at Islam yang *kaffah* harus memisahkan diri dari NKRI, lalu memicu terjadinya disharmonisasi dengan Pemerintah.

Berikut ini dikemukakan data penduduk NAD berdasarkan kelompok agama sebagai berikut;

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Kota Se NAD Tahun 2004

No	KABUPATE N/KOTA	A G A M A					JLH
		Islam	K.Prot	Katol.	Hindu	Budha	
1	Kota B. Aceh	247.976	1.319	1.748	34	3.094	254.171
2	Kota Sabang	24.285	486	184	-	307	25.262
3	Kab. Aceh Besar	277.996	224	194	42	64	278.524
4	Kab. Pidie	519.181	16	17	-	203	519.417
5	Kab. Aceh Utara	487.503	42	6	14	526	488.091
6	Kab. Aceh Timur	334.133	13	-	-	33	334.179
7	Kab. A. Tengah	149.478	191	-	11	244	149.924
8	Kab. A. Tenggara	138.158	28.105	1.030	-	-	167.293
9	Kab. Aceh Barat	173.899	94	71	592	6	174.662
10	Kab. Aceh Selatan	107.065	39	-	76	-	107.180
11	Kab. Simeulu	70.689	47	6	4	4	70.750
12	Kab. Aceh Singkil	133.971	5.614	3	-	3	139.591
13	Kab. Bireuen	376.952	189	-	32	237	377.410
14	Kota Langsa	117.477	165	8	13	105	117.768
15	Kota Lhoksemaue	162.025	475	250	42	742	163.534
16	Kab.A. Barat Daya	272.615	1	2	-	94	272.712

16	Kab. A. Barat Daya	272.615	1	2	-	94	272.712
17	Kab. Gayo Lues	76.818	-	-	-	-	76.818
18	Kab. A. Tamiang	250.975	482	285	67	986	252.777
19	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-
20	Kab. Nagan Raya	143.964	11	2	2	16	143.995
21	Kab. Bener Meriah	117.749	8	-	-	-	117.757
J U M L A H		4.182.891	37.521	3.810	929	6.664	4.231.815
PERSENTASE		98,84 %	0,89 %	0,09 %	0,02 %	0,16 %	100 %

Sumber: Data kependudukan NAD berdasarkan agama Kantor Wilayah Departemen Agama NAD tahun 2005

Data tersebut memperlihatkan bahwa penduduk NAD pada umumnya beragama Islam, yaitu sebesar 98,84 %, sedang non muslim secara keseluruhan adalah penduduk minoritas yang sangat kecil jumlahnya, yaitu 1, 16 %, dan ini diklasifikasi kepada 4 (empat) penganut agama, yaitu Kristen Protestan sebanyak 0,89 %, Katolik 0,09 %, Hindu 0,02 %, dan Budha sebanyak 0,16 %.

Meskipun di NAD dijumpai non muslim sebesar 1,16 % namun tidak dijumpai anggota DPRD yang tidak beragama Islam. Semua DPRD TK.I Propinsi, demikian juga dengan TK.II Kabupaten Kota adalah beragama Islam.⁹ Terlepas dari aspek keterwakilan mereka untuk menampung aspirasi yang mereka emban, mungkin karena sedikitnya jumlah mereka ini maka untuk memenangkan anggota DPR yang non muslim pada saat pemilu tidak dapat diupayakan.

Berikut ini dikemukakan data tentang rumah ibadah, dan kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, sebagai berikut;

**Tempat Ibadah dan Kerusakan Berat dan Ringan
Akibat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004
Serta Prakiraan Kerugian**

NO	TEMPAT IBADAH	BUAH	PERSEN	RUSAK BERAT/ RINGAN	PERSEN	JLH Keru gian Dalam Juta Rp
1	Mesjid/Mushalla /Meunasah	11.056	97,3 %	1.059	9,6 %	423.600
2	Gereja	177	1,6 %	8	4,5 %	3.200
3	Wihara dan Kuil	123	1,1 %	21	1,6 %	800
JUMLAH		11.365	100 %	1069	15,5 %	427.600

Sumber: Hasil sensus penduduk pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias) oleh Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005).

Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam

Sampai sekarang ini belum ada qanun khusus yang mengatur tentang hukum pidana Islam di NAD, tetapi hukum pidana Islam itu masih tersebar pada qanun-qanun yang ada. Setelah diteliti ternyata baru ada 5 qanun yang memuat hukum pidana Islam tersebut sebagai berikut;

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam,
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya,
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir (perjudian),
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum),
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan zakat.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

- a. Hudud¹⁰ (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat *hudūd* ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan

berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan *hudūd* seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah NAD baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang “mengonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.¹¹ Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah NAD dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nass* yang *qat’iyyah*. Dengan demikian Pemerintah NAD tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, dari Anas bin Mālik RA., Bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul Saw., maka Rasul Saw. Mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal seperti ini diikuti oleh Abū Bakar ...¹²

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, dari ‘Alī tentang kisah al-Wālid ibn ‘Uqbah, bahwa Usmān ibn ‘Affān telah menyuruh Ali untuk menerapkan hukum cambuk terhadap Wālid ibn ‘Uqbah karena dia meminum khamar, untuk hal ini ‘Alī meminta Abdullāh ibn Ja‘far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap empat puluh kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup, dan menambah ucapannya lagi; Rasul melakukan cambukan pada orang meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abū Bakar juga melaksanakan demikian, ...¹³

Direncanakan bahwa kasus kedua menyangkut hudud ini adalah tindak pidana pencurian dengan sanksi hukuman potong tangan.¹⁴ Sampai sekarang, hal ini belum diterapkan, karena untuk tindak pidana pencurian ini belum ada aturannya. Diperkirakan dalam masa dekat (tahun 2006) ini Perda/ Qanun tentang pencurian akan lahir, sekarang masih bersifat Ranperda, naskah akademiknya telah selesai, namun belum sampai ke tangan MPU dan Dinas Syari‘at, dan jelas belum disidangkan oleh DPRD NAD. Dengan demikian kasus pencurian ini belum termasuk kasus yang sudah diterapkan sekarang ini di NAD.¹⁵

- b. Ta'zir¹⁶ (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta'zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Sejalan dengan hal ini, DPRD NAD telah mencoba mengkonkritkan hukum ta'zir pada kelima kasus seperti dikemukakan di atas sehingga pada saat hakim hendak memutuskan perkara, hakim tersebut telah memiliki aturan yang jelas untuk diberlakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum ta'zir tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut;

- 1). Hukum Cambuk;

Contoh, Hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi (maisir)

- 2). Hukum Denda;

Contoh, Hukuman denda maksimal membayar Rp 35.000.000 minimal Rp 15.000.000 bagi orang yang a). Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian (maisir)., b). Menjadi pelindung perbuatan perjudian., c). Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.

- 3). Hukum Penjara;

Contoh, Hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat (mesum).

- 4). Hukuman Administratif;

Contoh, dicabut izin usahanya bagi perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu.

- 5). Hukuman Kumulasi dari hal tersebut di atas;

Contoh, Menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda

- 6). Hukuman Berpilih dari hal tersebut di atas;

Contoh, Memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Dualisme Hukum Pidana di NAD

Terjadinya kekhawatiran dualisme hukum pidana di NAD adalah antara hukum pidana Indonesia secara umum di satu sisi, dan hukum pidana NAD yang diatur lewat qanun-qanun sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari'at Islam di sisi yang lain. NAD sebagai sebuah propinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan bhinneka tunggal ika yang sama dengan Daerah lain di Nusantara, dia harus berada dalam bingkai falsafah dan konstitusi Negara Pancasila dan UUD 1945, jelas tidak ada tawar menawar akan hal ini karena terkait dengan keutuhan NKRI itu sendiri. Dengan tidak mengabaikan akan hal itu, ternyata realitas telah menampakkan nuansa baru dalam memaknai dan menjabarkan arti dari NKRI itu sendiri khusus untuk NAD, jika seluruh Daerah di Indonesia telah diberikan status Otonomi Khusus, maka NAD telah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk menjalankan syari'at Islam. Dengan hal ini terlihat adanya kesempatan yang besar bagi NAD untuk mempola pembangunan NAD ke arah yang lebih islami dibanding dengan daerah lain di Nusantara.

Adanya peran yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi membangun NAD menjadi sebuah propinsi yang berbeda dengan Daerah lain di Nusantara jelas melahirkan eksklusifisme NAD dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksklusifisme ini sangat rentan dengan asas *equality before the law* (mempersamakan semua orang di bawah hukum), dan sangat subur dengan pemberian hak-hak istimewa di luar yang berlaku secara umum. Dengan kenyataan seperti ini otomatis akan melahirkan adanya dualisme hukum yang berwawasan nasional dan bhinneka Tunggal Ika di satu sisi, serta hukum yang berwawasan lokal dan ke-Acehan pada sisi yang lain.

Dengan mengkaji latarbelakang serta sumber kedua hukum ini tentu pikiran kita akan dapat mengklasifikasi bahwa di sana ada dua macam hukum yang berbeda, dan tidak saling melingkupi, karenanya dengan menaati salah satunya kita tidak dapat dinyatakan telah melaksanakan keduanya, dan dengan melaksanakan keduanya di sana ada kemuskilan karena akan mengamalkan dua hal yang berbeda oleh seorang subjek hukum pada satu kesempatan. Dengan mempertajam pandangan ini akan lebih mengkontraskan kehadiran dualisme hukum seperti dikemukakan di NAD sekarang ini. Untuk hal ini akan diberikan penjelasan lebih rinci sebagai berikut;

Di satu sisi terpahami adanya dualisme hukum pidana di NAD, yaitu Hukum Pidana Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat umum

seperti yang tertuang di dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) karena NAD adalah bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Qanun (Perda) yang berdasarkan syari'at Islam dan dibuat oleh masyarakat NAD sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena NAD telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk menerapkan syari'at Islam berdasar UU No.18 Tahun 2001. Penempatan kedua ini sebagai sesuatu yang berhadapan tentu akan mempertajam pemaknaan terhadap dualisme hukum pidana di NAD tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asas kepastian hukum, dan keadilan hukum. Jelas bahwa dualisme hukum seperti dipersepsikan ini akan menimbulkan kajian tersendiri dalam rangka mencari titik temu kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menepis berbagai kekhawatiran dampak negatif yang muncul akibat penerapan syari'at Islam bagi NAD tersebut, terutama adanya dualisme hukum pidana yang dapat berakibat terhadap rontoknya asas kepastian hukum, dan asas *equality before the law*, dan yang lainnya maka disajikan uraian berikut ini.

Sejak awal perbincangan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah disadari betul tentang akan munculnya kajian dualisme hukum di NAD ini. Untuk tidak terjerembabnya NAD dalam ketidakpastian yang ditimbulkan akibat dari dualisme hukum seperti dikemukakan maka para pemerakarsa hukum kita telah mengantisipasi dengan berbagai hal, sebagai berikut;

1. Penegasan hal-hal yang masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

- a. Bidang pertahanan negara

Dalam Penjelasan Umum UU No.18 Tahun 2004 dinyatakan; ... *Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.*"¹⁷

Mengingat pertahanan negara Republik Indonesia adalah menjadi kewenangan Pemerintah pusat, maka masyarakat NAD tidak boleh melahirkan qanun yang berkenaan dengan hal ini, apalagi qanun yang sifatnya berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, pengabaian

terhadap hal ini dipahami sebagai melampaui kewenangan, dan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tidak dapat diberlakukan. Selanjutnya mengenai pengaturan tata ruang pertahanan di wilayah NAD yang tidak bersifat rahasia maka masyarakat NAD memiliki sedikit hak untuk berbicara dengan Pemerintah, karenanya masyarakat NAD bisa merencanakan sesuatu untuk hal ini. Dengan demikian menyangkut bidang pertahanan ini didominasi oleh Pemerintah Pusat.

b. Bidang keuangan

Bidang keuangan NAD diatur secara berimbang. Di samping mengacu kepada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, juga diatur di dalam pasal 4 – 7 UU No.18 Tahun 2001. Secara teknis, sampai sekarang, penentuan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini belum dipertegas secara tuntas, meskipun UUPA (Undang Undang Pemerintahan Aceh) telah lahir dan mengamanatkan hal itu, namun masih ada saja orang yang berkeinginan mempertanyakannya, sehingga hal ini dipahami belum dapat diselesaikan secara tuntas dalam koridor asas keadilan dan keseimbangan yang transparan.

2. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum

Qanun (Perda) yang digali dan lahir dari masyarakat NAD sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat NAD yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku secara umum di Nusantara mendapat tempat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di NAD. Untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh qanun maka qanunlah yang akan diberlakukan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang Undang No. 18 Tahun 2001 tersebut, dalam salah satu alineanya dinyatakan; *“Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogat lex generalis, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qonun.”*¹⁸ Dengan penjelasan ini maka dipahami bahwa qanun sebagai suatu tatanan Peraturan Daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP yang bersifat umum.

Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum *lex superiore derogat lex infiriore* (secara

hirarkis peraturan perundang undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam sistem Negara yang masih tersentralisasi, karena adanya koridor hukum yang tegas yang berlaku secara Nasional, misalnya bidang pertahanan kemanan, dan aspek tertentu dari keuangan seperti dikemukakan. Selain dari hal tersebut, maka daerah ditentukan sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dan daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam porsi yang lebih besar, termasuk dalam melahirkan Perda/ Qanun sesuai dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut, karenanya sangat tepat memberlakukan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum). Daerah dapat saja memberlakukan Perda yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor kewenangan yang diberikan, meskipun dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hirarkisnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, NAD misalnya boleh saja memberlakukan hukum cambuk dalam rangka mengamalkan qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan KUH Pidana. Hal ini bukan dalam rangka mengadakan perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2001.¹⁹

Sekarang ini memang ada suara anak bangsa yang mencoba memberikan pendapat yang cukup tajam, dan mendasar meskipun sifatnya kecil, mereka memahami tentang lahirnya perda-perda yang berisi syari'at (dalam hal ini dipahami NAD sebagai daerah yang memperoleh kesempatan istimewa) telah mengaburkan tujuan pendirian Bangsa ini sebagai bangsa yang nasionalis. Sejak semula kita telah menghindari eksklusivisme agama (terutama Islam); dalam dasar negara, dalam Piagam Jakarta, dalam sidang konstituante yang berakhir dengan Dekrit 5 Juli 1959, dalam sikap ORBA tentang pengasastunggalan Pancasila bagi seluruh kegiatan sosial dan politik di Indonesia, bahkan dalam amandemen UUD 1945 pada masa reformasi. Justru sekarang ini penerapan syari'at itu telah lahir secara terselubung di berbagai daerah lewat perda-perda sebagai dampak dari otonomi Daerah yang diberikan sekarang ini. Pandangan ini jelas menaruh kecurigaan yang berlebihan tentang adanya penafsiran yang terlalu jauh terhadap Dasar negara yang nasionalis itu, sehingga kelompok tertentu dari komponen bangsa ini meraup keistimewaan.

3. Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim saja

Dengan memperhatikan kandungan keseluruhan qanun yang ada di NAD itu maka qanun-qanun tersebut ada dua macam, yaitu qanun syari'at, dan qanun non syari'at (yang berkenaan dengan aspek keduniaan semata). Khusus menyangkut qanun syari'at hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang untuk qanun yang non syari'at akan berlaku secara umum untuk masyarakat NAD secara keseluruhan. Polarisasi ini tetap dalam kerangka mempertahankan asas kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing oleh masyarakat NAD.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam yang ada di NAD itu menganut asas personalitas keislaman. Artinya, qanun-qanun syari'at seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, bahkan penganut aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non muslim di NAD tidak ada kesulitan untuk tetap tinggal di NAD, karena mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, di samping tetap menaati qanun yang bersifat non syari'at.

Kesimpulan seperti ini secara jelas dapat dipahami dari:

- a. Pasal 25, ayat (3) Undang Undang No.18 Tahun 2001 mengatakan; "Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam."²⁰
- b. Perda No.5 Tahun 2000, pada pasal 2 ayat (2) berbunyi; "Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing."²¹
- c. Pasal 3A UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi; "Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan Pengadilan yang diatur dengan undang-undang."²²

Sejalan dengan ini, Al Yasa' Abubakar mengatakan bahwa penekanan utama pemberlakuan syari'at Islam di NAD adalah dengan memperhatikan asas personalitas keislaman. Pemaknaan memberlakukan asas personalitas keislaman di sini adalah, syari'at Islam itu hanya diberlakukan bagi masyarakat dengan memperhatikan agama pelaku tindak pidana itu sendiri harus benar-benar beragama Islam, lebih konkrit untuk hal ini bisa dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya,

pengamalannya, dan pengakuannya.²³ Ketegasan ini membuat pengetahuan tentang apa agama pelaku tindak pidana itu di NAD menjadi sangat penting dalam hal penentuan penundukan hukum mereka.

Muslim Ibrahim mengatakan bahwa hukum Islam yang diterapkan di NAD adalah murni berdasarkan syari'at Islam, karenanya hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang non muslim tidak termasuk di dalamnya, soal urusan agama mereka biarlah mereka yang mengaturnya sendiri. Dengan demikian qanun sebagai bagian dari hukum Islam yang berlaku di NAD hanya diberlakukan bagi umat Islam semata.²⁴

Sekedar mengapresiasi hal ini, terlihat bagi kita bahwa pemberlakuan hukum Islam di NAD yang ada sekarang ini jelas masih berada dalam koridor trilogi kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah, juga sejalan dengan pedoman dasar dalam beragama bagi bangsa Indonesia yang diatur pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Di samping mengacu kepada asas personalitas keislaman seperti telah dikemukakan, juga berpedoman kepada UU No.18 Tahun 2001, Qanun No.5 Tahun 2000, dan pernyataan para pakar, hal ini juga telah dipahami benar oleh non muslim. Misalnya Friez R. Tambunan (Pakar Kristen yang kini menjabat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M), Kepala Pusat Penelitian Humaniora, dan Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Katolik St. Thomas Medan.) mengatakan; Kepala Dinas Syariat Islam NAD Al Yasa' Abubakar memang sudah menegaskan bahwa penerapan syari'at Islam hanya berlaku bagi umat Islam, sehingga mereka yang non muslim tidak perlu merasa takut berlebihan mendengar syariat Islam. Beliau juga menjamin bahwa syari'at Islam mengatur dan menjamin hak-hak non muslim di NAD, jika hal ini memang secara nyata bisa berjalan dengan baik di NAD, pastilah persepsi yang salah di berbagai pihak tentang pelaksanaan syari'at Islam sebagai suatu alternatif sistem tata kenegaraan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan umum, akan terkoreksi.²⁵

Sebuah pertanyaan menarik yang dikemukakan oleh Al Yasa' Abubakar berkaitan dengan penentuan penetapan hukum yang dihubungkan dengan kajian asas personalitas keislaman dan territorial tersebut, dikatakan; Seandainya ada masyarakat non muslim NAD yang secara suka rela tunduk dan patuh terhadap qanun di satu sisi,

namun dengan tetap berpegang kepada keyakinan agamanya pada sisi yang lain, hal seperti ini pernah terjadi pada masa kolonialis Belanda berkuasa di Indonesia, di mana bangsa Indonesia diberi kebebasan untuk menundukkan diri kepada hukum Barat (misalnya BW) yang mereka berlakukan. Al Yasa' Abubakar dalam tulisannya memiliki kecenderungan bahwa; 1). Jika hal itu merupakan bagian dari ajaran agama mereka, maka mereka tidak layak untuk tunduk dan patuh terhadap qanun, tetapi cukup dengan apa yang sudah diatur di dalam agama mereka itu saja., 2). Jika hal itu tidak diatur di dalam agama mereka, dan apa yang ada di dalam qanun itu adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka, karenanya bila dengan mengamalkan hal itu bukan dalam rangka melanggar agamanya, maka jadilah hal ini sebagai masalah yang seyogianya mendapat kajian dan diskusi terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan boleh atau tidak.²⁶ Khusus untuk kemungkinan yang kedua ini belum terjawab dengan tuntas.

Dalam bentuk realitas, peristiwa seperti dikemukakan di atas telah terjadi di NAD dan telah disikapi dengan tegas, dengan kesimpulan bahwa bagi mereka yang nota bene non muslim itu tidak dapat diberlakukan hukum Islam seperti apa yang ada di dalam qanun. Kasus ini terjadi terhadap 6 (enam) orang supir truk yang melakukan tindak pidana judi di Banda Aceh, 2 (dua) orang dari mereka muslim, sedang 4 (empat) orang lainnya non muslim. Setelah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian, 4 (empat) orang dari mereka yang non muslim itu memohon kepada aparat penegak hukum supaya mereka disidangkan di Mahkamah Syari'ah dengan memberlakukan hukum Islam, permohonan mereka ini direspon oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dengan cara mengarahkan penyelesaian perkara mereka ke Mahkamah Syari'ah, namun begitu sidang pertama dibuka untuk perkara mereka hakim majelis Mahkamah Syari'ah Banda Aceh mengatakan bahwa penyelesaian perkara 2 (dua) orang yang muslim dari mereka benar menjadi wewenang Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, dan sidang penyelesaian perkara mereka dapat dilanjutkan, sedang untuk 4 (empat) orang non muslim lainnya dinyatakan tidak menjadi wewenang Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh, karenanya mereka berempat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian perkara mereka harus dilimpahkan ke sana.²⁷ Ini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun mereka yang Islam dan non muslim secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana yang diatur oleh qanun (hukum Islam), namun

untuk mereka yang non muslim tetap tidak dapat diberlakukan hukum Islam, seperti halnya bagi muslim pelaku tindak pidana lainnya, demikian juga halnya, mereka yang berkeinginan untuk memperoleh keadilan lewat qanun (syari'at Islam), jika mereka ternyata non muslim maka sama sekali tidak dapat dikabulkan. Ketegasan ini sekaligus dipahami bagian dari penerapan asas persoanalitas keislaman, dan territorial tersebut.

Demikian tegasnya aturan hukum secara normatif ini ditampilkan secara tertulis, dan dipraktekkan, namun berbeda dengan keinginan masyarakat secara umum. Secara teoritis, dan praktis dinyatakan bahwa hukum Islam hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi termasuk bagi masyarakat Aceh secara umum, baik muslim maupun non muslim. Keinginan ini tentu mengenyampingkan asas keislaman, dan mengedepankan asas territorial semata.

Realitas ini dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut;

Pemberlakuan Hukum Islam Hanya Bagi Umat Islam Yang Melakukan Tindak Pidana Di Nad Saja

Pertanyaan	SS	S	BS	TS	STS	JLH
Bagaimana pendapat saudara jika hukum Islam hanya berlaku bagi muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh saja.	11	25	20	80	24	160
Persentase	6,9	15,6	12,5	50	15	100

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

Biasa Saja = BS

Tidak Setuju = TS

Sangat Tdk Setuju = STS

Ternyata pada umumnya masyarakat Aceh tidak menyetujui pemberlakuan hukum Islam dibatasi hanya bagi masyarakat muslim Aceh,

dan masyarakat muslim selain Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh saja. Terbukti dari penolakan masyarakat sebesar 65 % yang tidak menyetujui hal itu, dengan perincian penolakan secara keras sebesar 15 %, dan penolakan biasa sebesar 50 %. Sebaliknya, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang melakukan persetujuan, yaitu sebesar 22,5 %, yang terdiri dari sangat setuju 6,9 %, dan setuju biasa 15,6 %. Selebihnya, yaitu 12,5 % bersikap apatis.

Untuk pemberlakuan hukum Islam bagi non muslim terlihat pada tabel berikut;

Pemberlakuan Hukum Islam Termasuk Bagi Non Muslim

Pertanyaan	SS	S	BS	TS	STS	JLH
Hukum Islam tidak berlaku bagi non muslim	18	47	24	51	20	160
Persentase	11,2	29,4	15	31,9	12,5	100

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

Biasa Saja = BS

Tidak Setuju = TS

Sangat Tdk Setuju = STS

Data ini memperlihatkan bahwa penolakan masyarakat lebih besar dari pada yang mendukungnya, jika hukum Islam tidak diberlakukan bagi non muslim. Terdiri dari 44,4 % masyarakat yang menolak tidak memberlakukan hukum Islam bagi non muslim, dengan perincian menolak secara keras sebanyak 12,5 %, dan dan menolak biasa sebanyak 31,9 %. Sebaliknya, yang menerima tidak berlakunya qanun (hukum Islam) bagi non muslim sebesar 40,6 %, dengan perincian sangat setuju sebesar 11,2 %, dan setuju biasa sebesar 29,4 %. Selebihnya, sebesar 15 % bersikap apatis (biasa-biasa saja).

4. Pemberlakuan asas teritorial

Suatu kajian yang mendasar dalam menetapkan peristiwa hukum adalah menyangkut di mana hal itu dilakukan. Pertanyaan ini berkaitan

dengan lokasi atau tempat peristiwa hukum terjadi, hal ini sangat penting sejalan dengan adanya perbedaan hukum masing-masing tempat. Indonesia sebagai suatu NKRI saja paling tidak sudah terpola kepada tiga macam, yaitu; 1). NAD sebagai daerah yang telah diberi keleluasaan yang besar untuk menerapkan syari'at Islam, 2). Daerah-daerah di Nusantara sebagai pemegang hak otonom memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dalam aspek-aspek khusus yang telah diberi kebebasan untuk itu, 3). Hukum yang berlaku yang berlaku umum untuk seluruh daerah Indonesia. Adanya perbedaan hukum yang berlaku berangkat dari pendekatan di mana peristiwa hukum ini dilakukan disebut dengan asas teritorial.

Di samping memperhatikan objek pelaku tindak pidana itu di satu sisi juga diperhatikan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, maka penentuan daerah NAD sebagai teritori yang dipedomani untuk dapat dinyatakan berlakunya qanun adalah merupakan kemutlakan. Artinya, hanya tindak pidana yang dilakukan di NAD sajalah yang menjadi perbincangan qanun-qanun itu, asalkan tempatnya di NAD meskipun orangnya bukan masyarakat NAD tidak menjadi persoalan lagi, yang penting mereka sedang berada di NAD. Dengan mencermati hal ini terlihat bahwa asas teritorial ini diberlakukan di NAD.

Dengan pemberlakuan asas personalitas keislaman, dan asas teritorial seperti dikemukakan di atas maka ada empat macam pedoman, sebagai berikut;

- a. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD secara otomatis hukum Islam (qanun) diberlakukan bagi mereka.
 - b. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan hukum Islam.
 - c. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak pidana di NAD atau pun di luar NAD tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali.
 - d. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di luar NAD juga tidak diberlakukan hukum Islam.
5. Putusan Kasasi²⁸ dan Peninjauan kembali²⁹ tidak dalam rangka menentang pemberlakuan hukum Islam

Meskipun Mahkamah Agung memiliki hak menguji dan membatalkan keputusan Pengadilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung hanya

memiliki acuan yang nasionalis, tetapi dia harus mendukung penerapan syari'at Islam di NAD. Mahkamah Agung akan dipahami keliru bila lewat kasasi dan Peninjauan kembali, dia berani membatalkan penerapan hukum Islam di NAD dengan mencari alternatif hukum lain. Logika yang dikembangkan adalah, sikap mengukuhkan putusan Mahkamah Syari'ah, dan Mahkamah Syari'ah Pripinsi di NAD adalah yang paling bijak, berarti Mahkamah Agung telah mempedomani pesan yang diemban oleh UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD. Dengan demikian Mahkamah Agung harus memutus dalam sidang Kasasi atau Peninjauan Kembali untuk perkara Hukum Pidana Islam dengan berpedoman kepada qanun yang sudah dibuat oleh DPRD NAD.

Pemahaman seperti di atas dikemukakan sejalan dengan Penjelasan Umum UU No.18 Tahun 2001 yang berbunyi;

"Hal mendasar dari Undang Undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi NAD dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi NAD dan *mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.*"³⁰

Lebih tegas lagi hal ini dijumpai dari Penjelasan Umum Undang Undang tersebut pada alinea berikutnya. Di sana dinyatakan; "Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qonun."³¹ Ini mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung harus tidak mempergunakan hukum yang bersifat umum itu sebagai pedoman dalam memutus pada sidang kasasi untuk perkara yang bersumber dari daerah NAD, tetapi dia mesti berpedoman kepada qanun, dalam rangka menopang berlakunya hukum Islam yang khusus berlakunya di NAD. Lewat otonomi daerah yang digelar di era reformasi ini maka Mahkamah

Agung harus menopang setiap produk hukum Daerah dalam rangka memperkokoh makna dari otonomi daerah tersebut.

Bila Mahkamah Agung, misalnya berkeinginan untuk membatalkan hukum Islam yang diberlakukan di NAD itu maka akan sama artinya dengan membatalkan Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya bagi NAD itu. Hilangnya kemandirian dan keleluasaan masyarakat NAD untuk memberlakukan syari'at Islam, jelas merupakan sikap pengebirian terhadap perjuangan panjang masyarakat Aceh yang sudah berhasil diraih di era reformasi ini. Bila hal ini yang terjadi berarti Indonesia mundur kembali kepada era sebelum reformasi.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat NAD, seperti terlihat dalam tabel berikut ini;

**Sikap Masyarakat Jika Mahkamah Agung
Menukar Keputusan Mahkamah Syari'ah dan
Mahkamah Syari'ah Propinsi**

Pertanyaan	SS	S	BS	TS	STS	JLH
Bagaimana pendapat saudara jika Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menukar hukum Islam yang ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah, dan Mahkamah Syari'ah Propinsi	5	17	18	60	60	160
Persentase	3,1	10,6	11,3	37,5	37,5	100

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

Biasa Saja = BS

Tidak Setuju = TS

Sangat Tdk Setuju = STS

Data ini memperlihatkan bahwa pada umumnya masyarakat NAD tidak setuju jika Mahkamah Agung menukar keputusan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi. Hal ini terbukti bahwa 75 % masyarakat tidak menginginkan Mahkamah Agung menginter-

vensi terhadap penerapan syari'at Islam yang sudah diputus oleh Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi tersebut, yang terdiri dari 37,5 % tidak menginginkan dengan menolak sangat keras, dan 37,5 % lagi menolak dengan biasa. Hanya sebagian kecil masyarakat NAD, yaitu 13,7 % yang masih setuju diintervensi oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari sangat setuju 3,1 %, dan setuju biasa sebesar 10,6 %. Selebihnya bersikap apatis, yaitu 11,3 %.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat kepuasan penerapan hukum Islam yang sangat tinggi NAD. Hal ini dapat disimpulkan dari semua perkara yang ditangani di Mahkamah Syari'ah (57 perkara seperti terlihat pada tabel sebelumnya, bahkan sudah ada sekitar 100 perkara pada saat penelitian ini dilakukan), namun tak seorang pun yang berkeinginan untuk melakukan upaya hukum banding, meskipun hakim sudah menawarkannya. Bahkan, persidangan sering dilakukan hanya sekali sidang saja, karena terdakwa cenderung bersikap mudah, dan ingin perkaranya cepat diputus. Lebih dari itu lagi, tidak jarang dari mereka itu menginginkan setelah adanya keputusan hakim supaya eksekusi segera dilaksanakan meskipun dengan mengabaikan masa banding dua minggu menunggu keputusan itu berkekuatan hukum, karena terpidana tidak sabar menunggu. Mengingat banding saja pun sampai saat ini masih 0 %, ³² maka diperkirakan adanya kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan Peninjauan Kembali, itu masih jauh kemungkinannya, apalagi keinginan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi tersebut dipahami masih sangat jauh.

Dengan mempedomani kelima poin tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di NAD yang sedang berjalan sekarang ini tidak berakibat terhadap munculnya dualisme hukum pidana di NAD. Penentuan orang sebagai objek hukum yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut semua berada dalam aturan yang jelas. Dengan demikian munculnya kekhawatiran berbagai pihak terhadap terabaikannya asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum akan terjawab.

Kesimpulan

Berlakunya syari'at Islam di NAD tidak berimplikasi kepada munculnya dualisme hukum pidana di NAD. Di satu sisi, hukum pidana di NAD telah jelas, yaitu sepanjang telah diatur oleh qanun maka berlakulah qanun tersebut, dan untuk hal yang belum diatur oleh qanun

maka tetap berlaku KUH Pidana sebagai kitab ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Nusantara, dan ini harus didukung oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yudikatif tertinggi, Di sisi lain menyangkut orang sebagai objek hukum yang mesti tunduk dan patuh terhadapnya juga telah jelas, aturan tentang siapa orang yang harus tunduk kepada qanun dan yang harus tunduk kepada KUH Pidana telah dipahami lewat asas personalitas keislaman dan asas teritorial. Dengan ketegasan ini, maka adanya kemungkinan munculnya dualisme hukum pidana yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum seperti yang dikawatirkan segelintir orang tidak akan terjadi.

Catatan

¹Bagi pengamat semisal Boland (1982), ia mencermati bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang unik, Indonesia ditempatkan sebagai suatu negara yang bukan sekuler, dan bukan pula negara teokrasi, tetapi menciptakan konvergensi, di mana Indonesia dinyatakan sebagai Negara Demokrasi Pancasila., Bagi Fachry Ali dan Bakhtiar Efendi memandang bahwa ini adalah bentuk kekalahan kelompok Islamis yang mereka nilai sebagai kurang mampu meyakinkan pihak Nasionalis., Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik ORBA* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 156-157.

²Kelompok Islam dapat menyetujui penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu dengan pemikiran bahwa; 1). Rasa optimisme akan tercapainya kemenangan Islam lewat pemilu yang segera akan dilaksanakan pada waktu yang tidak lama lagi., 2). Tingginya suhu politik di Jakarta saat itu sehingga mereka tidak ingin menciptakan suasana ketidaktenteraman., Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), h. 41-43.

³Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1998), h.102, Juga, Endang Saepuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 99.

⁴Pada mulanya panitia amandemen MPR Bidang Agama telah melakukan penelitian penjejakan akan hal ini dengan cara memperoleh masukan dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, seperti; MUI (Majelis Ulama Indonesia), DDI (Dewan Dakwah Islamiyah), WALUBI, PGI, dan KWI, dan yang lainnya, ternyata kecuali DDI, semua mereka berpendapat dalam rangka mempertahankan NKRI, integrasi bangsa, persatuan dan persatuan, harus mempertahankan dasar negara tetap dalam kenetralannya., Hal ini dikemukakan oleh Wakil Katib Syuriah PB NU Masdar Farid Mas'udi di kantor PB NU Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2002, PW NU Jawa Tengah, *AULA*, No. 4 (Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama, Tahun XXIV April 2002)

⁵Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang Undang Peradilan Terbaru*, cet. I (Jogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h.239-246.

⁶Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, *Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004* (BPS & BAPPEDA NAD, Banda Aceh, 2004), h. 3-4.

⁷*Harian Waspada* (9 Maret 2003).

⁸Bappenas, BPS, dan UNFPA serta CIDA, AusAID, dan Nzaid Hasil sensus penduduk pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (*Sensus Penduduk Aceh dan Nias*) yang dilakukan pada 15 Agustus -15 September 2005., h.12-13.

⁹Hasil wawancara dengan Al Yasa' Abubakar (Kepala Dinas Syari'at NAD) di kantornya (Banda Aceh) pada tanggal 07-02-2006.

¹⁰ Hukum Pidana (*Hudūd*) adalah Hukuman yang sudah ditentukan Allah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya, dan ini harus dilaksanakan karena berupa hak Allah SWT., Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fī al-Syari'at al-Islamīyah* (Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabi, 1976 M.), h. 13.

¹¹ Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Swetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), h.255, dan 260.

¹² Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, Juz iv (Bandung: Dahlan, t.t.), h. 28.

¹³ *Ibid.*, h. 30.

¹⁴ Jika qanun tentang pencurian ini telah lahir maka ada dua hal yang ingin disampaikan tentang hal ini, yaitu; Pertama, hukum pidana Islam yang diterapkan itu tidak lagi hanya masalah-masalah kecil, dan berdampak bagi masyarakat kecil semata, tetapi tindak pidana ini sudah mulai tingkat menengah (sedang), termasuk pelakunya akan meliputi kelas menengah ke atas, seperti pejabat yang melakukan korupsi., Kedua, meskipun hukum potong tangan telah diterapkan, tidaklah secara serta merta akan ada orang yang dipotong tangannya, bisa saja menjadi sok terapi untuk tidak ada orang yang dipotong tangan, karena tidak ada yang terbukti melakukan pencurian, Dinasti Saudi saja menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri pada tahun 1910, baru setelah 60 tahun ada tangan orang yang dipotong karena mencuri, yaitu setelah tahun 1970-an. Analisis seperti ini dikemukakan oleh Al Yasa' Abubakar (Kepala Dinas Syariat NAD) di kantornya pada tanggal 06-02-2006.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Al Yasa' Abubakar (Kepala Dinas Syari'at NAD) di kantornya (B. Aceh) pada tanggal 07-02-2006, juga Hasil wawancara dengan H.Amir Hamzah (Komisi E DPRD NAD) di kantornya (B.Aceh) pada tanggal 8-2-2006.

¹⁶ Ta'zīr adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari'at) tidak menentukan bentuk dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islamī*, Juz. 1, (Kairo: Maktabah Dār al-Turās, t.t.), h.85.

¹⁷ Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan ...* h. 31.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tulisan Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional", dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi*

Hukum Islam (Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001), h.9-12.

²⁰ Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan ...* h.26.

²¹ *Ibid.*, h.58.

²² Penjelasan pasal tersebut dinyatakan; Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari'ah Islam diatur dengan Undang Undang Mahkamah Syari'ah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa: Peradilan Syari'ah Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut Peradilan Umum., Indonesia Legal Center Publishing, *Undang Undang Peradilan Agama Undang undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), h.73, 97-98.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at NAD Al Yasa' Abubakar pada tanggal 06-02-2006 di Kantornya Banda Aceh.

²⁴ Hasil wawancara dengan Muslim Ibrahim (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama NAD) pada tanggal 07-02-2006 di rumahnya Perumaham IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

²⁵ Tulisan Fietz R. Tambunan Pr. dalam, Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, *Syari'at di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Fairus M. Nur Ibr. (Ed.) (Banda Aceh : Yayasan Ulul Arham, 2002), h.287-288

²⁶ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005), h. 145-148.

²⁷ Sidang Mahkamah Syari'ah Banda Aceh ini digelar pada tanggal 08 Pebruari 2006, dan disaksikan oleh Peneliti secara langsung, karena pada hari sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua MPU (Muslim Ibrahim), Kepala Dinas Syariat (Al-Yasa' Abubakar), dan Hakim Tinggi Mahkamah Syari'ah Propinsi NAD (Armia Ibrahim) kepada peneliti tentang akan digelarnya sidang tersebut, dan mereka sudah memperkirakan akan lahir keputusan Mahkamah Syari'ah seperti itu. Diduga pihak-pihak terkait, di antaranya pihak seperti dikemukakan, sudah terlebih dahulu mengadakan diskusi terhadap hal itu, lalu kesimpulannya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Syari'ah.

²⁸ Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan/ penetapan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Mahkamah Syari'ah), atau terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding (dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Propinsi), ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui Mahkamah Syari'ah yang dahulunya

memutus perkara tersebut., Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 224.

²⁹ Peninjauan kembali adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung, hal ini diajukan melalui Mahkamah Syari'ah yang dahulunya memutus perkara tersebut., *ibid*.

³⁰ Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan ...*, h. 31

³¹ *Ibid*.

³² Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, *Perkara Jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005.*, Juga, Hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Mahkamah Syari'ah Propinsi NAD Armia Ibrahim di kantornya pada tanggal 07 Pebruari 2006.

Bibliografi

- Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005.
- Al-Kahlāni, Muḥammad ibn Ismā'il. *Subul al-Salām*. Juz.IV. Bandung: Dahlan, t.t.
- Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zīr fī al-Syari'at al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabi, 1976 M.
- Anshari, Endang Saepuddin. *Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional" dalam Departemen Agama RI. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001.
- Audah, 'Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, Juz. 1. Kairo: Maktabah Dār al-Turās, t.t.
- Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid) *Hasil sensus penduduk pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias)* yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005.
- Dinas Syariat Islam Propinsi NAD. *Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transrformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Harian Waspada*. Edisi Hari Kamis, 9 Maret 2003.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Undang Undang Peradilan Agama Undang undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD. *Perkara Jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005*.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.

Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD. *Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004*, BPS & BAPPEDA NAD. Banda Aceh, 2004.

Pustaka Pelajar *Kumpulan Undang Undang Peradilan Terbaru*. Cet. I. Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2005.

PW NU Jawa Tengah. *AULA*. No. 4. Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama, Tahun XXIV April 2002.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Tambunan Pr., Friez R. "Syari'at di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam" dalam, *Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*.

Fairus M. Nur Ibr. (Ed.). Banda Aceh: Yayasan Ulul Arham, 2002.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik ORBA*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Pagar adalah Dosen Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Mmenyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.